

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Manajemen logistik merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, monitoring dan evaluasi. ( Kemenkes RI 2017). Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana dan perangkat lunak (metode dan tatalaksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan diberbagai tingkat unit kerja

Perencanaan obat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan obat di sarana pelayanan kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kesehatan adalah Puskesmas. Sebelumnya perencanaan obat dilakukan di puskesmas dan pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun di era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

sekarang ini, Puskesmas diberi kemudahan dalam pengelolaan logistik dengan melakukan perencanaan dan pengadaan sendiri, sehingga puskesmas lebih optimal dalam pengelolaannya. Kegiatan ini didukung dengan adanya dana kapitasi yang diberikan langsung ke Puskesmas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) (Uznul Athijah, 2016).

Berdasarkan observasi Manajemen pengelolaan obat dipuskesmas saat ini Di Indonesia belum berjalan dengan baik, ini dikarenakan pengelolaan obat dilihat dari pengadaan obat dari dinas kesehatan tidak sesuai dengan permintaan obat yang diusulkan puskesmas Hal ini menyebabkan Masalah manajemen logistic yang ada di Puskesmas saat ini adalah tingkat ketersediaan obat masih belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan karena masih sering terjadi kekurangan dan kekosongan obat disisi lain terjadi pula kelebihan obat. Oleh karena belum terpenuhinya kebutuhan obat tersebut, maka pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit atau Puskesmas lain untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan obat yang dibutuhkan (Pulungan, 2018).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2019, belanja obat merupakan anggaran terbesar biaya kesehatan. Di Indonesia biaya obat berkisar 40 persen anggaran kesehatan, namun sebagian besar dari populasi mungkin tidak memiliki akses terhadap obat esensial. Dana yang tersedia terbatas dan sering dihabiskan untuk obat tidak efektif, tidak perlu, atau bahkan berbahaya. (Depkes, RI 2019).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan mengenai provinsi yang melakukan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, sebagian besar provinsi telah memenuhi target 60%, yaitu 24 provinsi (70,59%) tetapi masih terdapat 10 provinsi yang belum mencapai target Renstra 2020, dan terdapat 63,88% instalasi farmasi kabupaten/kota

yang telah melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar dan 36,12% belum sesuai dengan standar (Kemenkes RI,2020)

Hasil penelitian dari Leli Sumiardi 2019, Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Rantau Panjang Kabupaten Merangin diperoleh bahwa manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Rantau Panjang belum maksimal, dimana input terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam manajemen pengelolaan obat yaitu tenaga yang ada tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sedangkan dana, sarana dan prasarana masih kurang serta metode yang digunakan hanya metode konsumsi. Dari segi proses perencanaan obat adanya ketidaksesuaian antara permintaan dengan penerimaan serta output dalam manajemen pengelolaan obat yang masih rendah dimana terjadinya penumpukan obat di Puskesmas Rantau Panjang Kabupaten Merangin.

Hasil penelitian dari Hastin fitria dkk 2019, Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Mesiji, menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji belum berjalan maksimal, diantaranya sering terjadi keterlambatan dalam laporan pemakaian obat, pencatatan dan pelaporan belum lengkap, masih terdapat jumlah dan jenis obat yang tidak sesuai permintaan Puskesmas dan masih terdapat obat kadaluwarsa, serta pelatihan pengelolaan obat di Puskesmas belum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jerwatu, Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 28 April 2021, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari 4 orang perawat yang bekerja di puskesmas jerwatu didapatkan data bahwa jadwal pengadaan obat di puskesmas jerwatu dilakukan sebulan sekali, 4 orang perawat mengatakan bahwa pengadaan obat

tidak dilakukan oleh tenaga kefarmasian atau apoteker karena kurangnya tenaga kesehatan sehingga pengadaan obat dan tanggung jawab dalam manajemen pengelolah obat adalah perawat Pengadaan obat yang dilakukan sering mengalami masalah seperti kekurangan obat maupun kelebihan sehingga ada obat yang kadawasa dan tidak bisa digunakan lagi, hal ini menyebabkan pengadaan obat yang dilakukan sering tidak sesuai dengan permintaan puskesmas, dari hasil observasi tersebut bisa disimpulkan bahwa masalah pengelolaan obat yang terjadi pada proses perencanaan karena tidak ada standar operasional prosedur pengelolaan obat dan tidak ada tim khusus dalam perencanaan pengelolaan obat.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pengobatan di puskesmas maka obat-obatan merupakan unsur yang sangat penting, karena ketidak efisienan akan memberikan dampak negatif terhadap biaya operasional Puskesmas, karena bahan logistic obat merupakan salah satu tempat kebocoran anggaran, sedangkan ketersediaan obat setiap saat menjadi tuntutan pelayanan kesehatan maka pengelolaan yang efisien sangat menentukan keberhasilan manajemen Puskesmas secara keseluruhan. Tujuan manajemen obat adalah tersedianya obat setiap saat dibutuhkan baik mengenai jenis, jumlah maupun kualitas secara efisien, dengan demikian manajemen obat dapat dipakai sebagai sebagai proses penggerakan dan pemberdayaan semua sumber daya yang dimiliki/potensial yang untuk dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan obat setiap saat dibutuhkan untuk operasional efektif dan efisien. Proses pengelolaan obat di Puskesmas akan berjalan efektif dan efisien bila ditunjang dengan sistem informasi manajemen obat untuk menggalang keterpaduan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan obat, Diharapkan kepada puskesmas untuk meningkatkan Sistem informasi manajemen obat dan Menjalin kerja sama yang baik antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam pengadaan obat

sehingga, kebutuhan obat yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Berdasarkan Teori – teori, masalah yang ditemukan dan jurnal penelitian yang mendukung diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Manajemen pengelolaan obat pada wilayah kerja Puskesmas”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana manajemen pengelolaan obat di Wilayah Kerja Puskesmas”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Menganalisis Manajemen Obat di Wilayah Kerja Puskesmas

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi Manajemen Obat di Wilayah Kerja Puskesmas
2. Menganalisis Manajemen Obat di Wilayah Kerja Puskesmas

## **1.4 Manfaat**

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini menjadi sumber informasi dan referensi dalam ilmu keperawatan khususnya manajemen pengelolaan obat pada wilayah kerja puskesmas.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi tenaga kesehatan

Penelitian ini bermabfaat bagi tenaga kesehatan dalam memahami penggunaan obat terlebih khusus bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada puskesmas.

b. Bagi institusi

Penelitian ini dapat mendorong institusi agar lebih berperan penting dalam mengenalkan managemen penegelolaan obat bagi mahasiswa.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat berhguna sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dengan menambahkan Variabel-Variabel yang lain dalam peneitian.